

RANCANGAN AKHIR RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

KECAMATAN ANGGANA

TAHUN
2025-2029

Alamat :

**Jl. Mulawarman RT 1 Desa
Sungai Mariam 75381**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA



Kecamatan Anggana



anggana.kukarkab.go.id



@Kecamatan_anggana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Anggana ini berpedoman kepada Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Rencana Strategi Kecamatan Anggana pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Anggana ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.



Camat Anggana

RENDRA ABADI, S.STP.,M.Adm.KP
NIP. 198409222003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.1.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Anggana.....	30
2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan.....	46
2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan.....	46
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	48
2.2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah	50
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Anggana	69
3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah	73
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Anggana Tahun 2025-2029.....	75
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
4.1.1 PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	94
BAB V PENUTUP	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 7

Tabel 2.2 26

Tabel 2.3 27

Tabel 2.4 28

Tabel 2.5 29

Tabel 2.6 29

Tabel 2.7 31

Tabel 2.8 38

Tabel 2.9 48

Tabel 3.0 59

Tabel 3.1 71

Tabel 3.2 74

Tabel 3.3 74

Tabel 3.4 75

Tabel 4.1 81

Tabel 4.2 95

Tabel 4.3 108

Tabel 4.4 109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 9

Gambar 2 27

Gambar 3 54

Gambar 4 68

Gambar 5 70

Gambar 6 80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Anggana merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah yang mencakup berbagai potensi sumber daya alam, seperti perkebunan, pertanian, Minyak Bumi, Gas dan Pertambangan Batu Bara, Anggana memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. memberikan peluang dan tantangan baru yang memerlukan perencanaan strategis untuk menghadapi dinamika pembangunan pada periode 2025-2029.

Pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kecamatan Anggana akan memasuki periode baru yaitu tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah. Pasal 272 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025, menandai dimulainya Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, Kegiatan, dan

Sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Tahapan penyusunan Renstra PD meliputi: Persiapan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Anggana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Anggana ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);

5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil;
10. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 10 Tahun 2025 Tanggal 23 Desember 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan Kecamatan Anggana dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik *good governance* dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Anggana Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Kecamatan Anggana
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Anggana
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Anggana untuk periode 5 (lima) tahun kedepan
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran

5. Menyediakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja target, dan pagu indikatif
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
7. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Anggana.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Anggana Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

- Menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kecamatan Anggana.

BAB 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- Membahas tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengemukakan alasan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Anggana ini untuk memaksimalkan pelayanan dan mendukung pembangunan yang merata serta berkelanjutan.

BAB 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB 4 Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
- Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.
- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030

BAB 5 Penutup

- Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Anggana terletak di pesisir selatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Wilayah ini berada sekitar 56 km dari Tenggarong, ibu kota kabupaten, dan 20 km dari Samarinda, ibu kota provinsi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi "Kecamatan Anggana Dalam Angka 2024", luas wilayah Kecamatan Anggana mencapai 1.798,80 km².

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kecamatan Anggana mencapai 44.404 jiwa pada tahun 2025 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Wilayah ini terdiri dari 8 desa, dan 1 Desa Persiapan yaitu Desa Tanjung Berukang dengan total 139 Rukun Tetangga (RT) di desa. Kecamatan Anggana memiliki potensi sumber daya alam yang meliputi sektor Minyak Bumi dan Gas, Pertambangan Batubara, pertanian, perikanan, dan perkebunan sawit, serta menjadi jalur transportasi penting bagi kegiatan ekonomi di wilayah pesisir di 3 Kecamatan, antara lain Anggana, Muara Badak dan Marangkayu

Batas- batas Wilayah Kecamatan Anggana

Sebelah Utara	: Kecamatan Muara Badak
Sebelah Timur	: Selat Makassar
Sebelah Selatan	: Kecamatan Sangasanga dan Muara Jawa
Sebelah Barat	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Anggana



Tabel 2.1 Data Luas Wilayah Desa di Kecamatan Anggana

No	Nama Desa	Luas Wilayah Desa(Km2)	Persentase
1	Sepatin	624,87	34,74
2	Muara Pantuan	513,32	28,53
3	Tani Baru	71,50	3,97
4	Kutai Lama	308,95	17,18
5	Anggana	97,12	5,40
6	Sungai Meriam	116,54	6,48
7	Sidomulyo	30,00	1,67
8	Handil Terusan	36,50	2,03
TOTAL		1.798,80	100,0

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja perangkat daerah Pada maka tugas pokoknya adalah Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi dari kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk database serta analisa data untuk menyusun program kegiatan
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan kecamatan
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya
11. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan; pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan
12. Fasilitasi dan pembinaan terhadap desa/kelurahan serta lembaga kemasyarakatan

URAIAN TUGAS CAMAT:

- a) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kecamatan.
- b) Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Memberikan saran dan masukan kepada bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugas umum pemerintahan.
- d) Merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.

- e) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja dan penyusunan Laporan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- f) Merumuskan kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan pada seksi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- g) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- h) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- i) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan
- j) Mengkoordinasikan pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum
- k) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- l) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- m) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa atau kelurahan.
- n) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek-aspek oerijinan, rekomendasi, koordinsi, pembinaan pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan mencakup penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o) Merencanakan, mengelola, mengendalikan dan evaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati.
- p) Melaksanakan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan ditingkat kecamatan.
- q) Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati serta pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada bupati

- r) Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah sebagai bahan Informasi dan pertanggungjawaban kepada bupati.
- s) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi teknis dan organisasi lain yang menyangkut bidang tugas dan tanggung jawabnya
- t) Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemeberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan pelayanan Umum.
- u) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, camat dibantu oleh:

- I. Sekretaris camat mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam tupoksi sekretaris camat sbb:
 - a) Menyusun rencana kerja sekertariat kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - b) Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas
 - c) Mengkonsultasikan kegiatan Sekertariat yang bersifat Urgen kepada camat
 - d) Memberikan saran dan masukan kepada camat tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
 - e) Melaksanakan ketatausahaan, tata naskah dinas, urusan kearsipan serta perpustakaan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.

- g) Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja kecamatan
- h) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak- Pajak Pribadi (LP2P) dilingkungan Kecamatan.
- i) Mengkoordinasikan laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Bulanan Pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- j) Menghimpun dan menyampaikan bahan-bahan laporan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati, Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.
- k) Menyiapkan bahan-bahan penyuluhan kepada instansi terkait dan masyarakat dibidang Dokumentasi dan Informasi.
- l) Melakukan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- m) Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana kantor, pembinaan serta pengembangan pegawai.
- n) Menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pelayanan pemungutan pendapatan daerah yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati
- o) Mengkoordinasikan Sub-Sub Bagian yang melaksanakan Urusan Umum, Kerumahtanggaan, Keuangan dan Kepegawaian dilingkungan kecamatan.
- p) Mengkoordinasikan inventarisasi dan mempersiapkan urusan penghapusan barang
- q) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya.
- r) Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesektariatan

- s) Melaksanakan dan melaporkan Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Camat dibantu:

- I. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b) Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Umum berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - d) Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan yang bersifat Urgen kepada sekretaris
 - e) Memberikan saran dan masukan kepada sekretaris tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - f) Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Kepegawaian
 - g) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan layanan administrasi dalam lingkup kecamatan
 - h) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Kecamatan, meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol.
 - i) Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan laporan untuk penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap akhir tahun.
 - j) Menyiapkan pelaksanaan pemusnahan arsip yang tidak berlaku.
 - k) Meneliti dan memeriksa hasil pengetikan dan pengadaan.
 - l) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.
 - m)Menyusun, mendistribusikan rencana kebutuhan Perlengkapan, daftar inventarisasi dan perlengkapan kantor.

- n) Memelihara kebersihan kantor dan rumah Jabatan camat.
- o) Melaksanakan urusan pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang.
- p) Mengevaluasi pelaksanaan tugas menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan serta mencari alternatif pemecahannya.
- q) Menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan barang dilingkungan kecamatan secara sistematis kepada kantor pengelolaan aset Daerah.
- r) Menyiapkan daftar hadir PNS dan menyusun laporan Rekapitulasi daftar hadir bulanan Pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- s) Menghimpun bahan dan Data untuk perumusan kebijakan terkait dengan Urusan Kepegawaian dan Diklat.
- t) Menghimpun, mengusulkan kelengkapan Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Kecamatan sesuai syarat yang ditentukan.
- u) Menghimpun, mengusulkan kelengkapan Administrasi Pembuatan Asuransi Kesehatan PNS, TASPEN dan TAPERUM
- v) Menghimpun, memproses Data dan mengusulkan permohonan cuti, pemberian penghargaan, pensiun, pemberian sanksi bagi PNS.
- w) Menyusun Daftar Urut Kepengangkatan dan fasilitasi pembuatan DP3 PNS.
- x) Menyusun daftar penjagaan dan mengusulkan kenaikan pangkat, gaji Berkala serta KP.4 pegawai dilingkungan kecamatan
- y) Menghimpun dan memfasilitasi pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P) dilingkungan Kecamatan.
- z) Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- II. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) Menyusun Program dan Rencana Kerja Tahunan serta Rencana Anggaran dan Keuangan Tahunan sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas
 - b) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan berdasarkan Skala Prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - c) Mengkolsutasikan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan yang bersifat urgen kepada sekertaris.
 - d) Memberikan saran dan masukan kepada sekertaris tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - e) Menyiapkan, mengelola bahan untuk pengambilan kebijakan dan penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
 - f) Menyusun, mengusulkan dan menganalisis data dan dokumen penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
 - g) Menyiapkan, mengelola bahan untuk sosialisasi petunjuk teknis dan bahan pembinaan kegiatan penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
 - h) Memeriksa, meneliti penyiapan bahan pencairan anggaran oleh bendaharawan/Pemegang Kas.
 - i) Memeriksa, meneliti pelaksanaan pembukuan keuangan oleh bendaharawan/ pemegang kas.
 - j) Memeriksa, meneliti penyiapan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh bendaharawan /pemegang kas.
 - k) Menghimpun usulan RKA/DPA unit kerja internal Kecamatan sesuai dengan data yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran.
 - l) Melaksanakan verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kecamatan.

- m) Menyiapkan, mengelola bahan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kecamatan.
 - n) Membuat laporan Keuangan kecamatan.
 - o) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- III. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi pemerintahan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi pemerintahan yang bersifat urgen kepada camat melalui sekretaris.
 - e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui Sekertaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - f) Menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan bidang pertanahan dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan.
 - g) Mempersiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 - h) menyusun rencana dan program kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
 - i) Mendata, menghimpun dan mengelola data yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 - j) Melaksanakan administrasi pertanahan yang menjadi urusan kecamatan
 - k) Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan rapat koordinasi pemerintahan.
 - l) Melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan.
 - m) Menyelenggarakan administrasi bidang kependudukan dan catatan sipil serta melakukan pelaporan

- n) Menyelenggarakan proses administrasi, perijinan bidang pendaftaran kependudukan dan pertanahan yang merupakan Pelimpahan kewenangan dari bupati
- o) Memfasilitasi, menganalisis materi peraturan desa dan keputusan lurah yang disampaikan kepada bupati.
- p) Menyiapkan bahan dan menyusun Monografi Kecamatan serta Pembinaan monografi desa/kelurahan.
- q) Melaksanakan pembinaan administrasi dan keuangan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.
- r) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa (BPD).
- s) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- t) Memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa/ kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- u) Memfasilitasi Penyelesaian pengaduan masalah pertanahan.
- v) Memfasilitasi penyusunan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
- w) Melaksanakan urusan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil
- x) Menghimpun, menyusun data kependudukan dan catatan Sipil.
- y) Melaksanakan pembinaan kependudukan dan catatan sipil terhadap pemerintahan desa/kelurahan.
- z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

IV. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman melaksanakan tugas.

- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat Urgen kepada camat melalui sekretaris.
- e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.
- f) Menyusun program kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa/kelurahan, perbankan, perkreditan rakyat, perkoprasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan serta peningkatan produksi dan distribusi hasil produksi.
- g) Memfasilitasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pembangunan tingkat desa / kelurahan dan kecamatan.
- h) Mempersiapkan bahan urusan dalam bidang perindustrian dan perdagangan, bidang bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang perkoprasian, bidang pertambangan dan Energi, Pembinaan Lingkungan Hidup.
- i) Memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, Peningkatan peran serta, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.
- j) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data kegiatan usaha industri kecil, sumber daya alam dan sumber daya manusia sektor Industri.
- k) Melaksanakan pengumpulan, koordinasi dan Pelaporan data bidang pertanian.
- l) Melakukan koordinasi, bimbingan dan pemantauan terhadap ketahanan pangan diwilayah kecamatan, pengembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani, kelembagaan kelompok usaha ekonomi produktif.
- m) Monitoring, melaporkan perkembangan harga sembilan bahan pokok

- n) Mengkoordinasikan pembinaan, pemantauan dan perlindungan terhadap koperasi, usaha perkebunan dan Peternakan.
- o) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata.
- p) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data profil Kecamatan dan Desa, data kegiatan pembangunan desa / kelurahan dan kecamatan.
- q) Menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, pertambangan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati.
- r) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data perumahan, bangunan gedung dan drainase lingkungan.
- s) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan.
- t) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan lokasi daur ulang sampah (LDUS) dan air bersih Pedesaan.
- u) Melaksanakan koordinasi dan Sosialisasi rencana tata ruang.
- v) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan Data sumber pencemaran lingkungan hidup, sumber Daya Alam dan sumber daya buatan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup.
- w) Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air.
- x) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data penambangan sumber daya mineral dan energi dan pengambilan air bawah tanah.
- y) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

V. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan

- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas sebagai pedoman melaksanakan tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas yang bersifat urgen kepada camat melalui sekretaris.
- e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f) Mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta tertib perijinan.
- g) Mempersiapkan bahan serta penyelenggaraan pembinaan aparat penertiban, Polisi Pamong Praja, linmas kecamatan dan linmas desa/ kelurahan
- h) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, potensi perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
- i) Menghimpun, menyusun serta mengolah data, melakukan koordinasi dengan unit lain terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
- j) Mengatur penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban.
- k) Penegakan, pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- l) Menyiapkan bahan pembinaan dalam langkah pembauran Kesatuan Bangsa.
- m) Melaksanakan identifikasi potensi masalah ketentraman dan ketertiban serta upaya pencegahan.
- n) Memproses administrasi, rekomendasi dan perijinan bidang politik dalam negeri dan administrasi publik yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati.
- o) Menginventarisasi, menyusun dan melaporkan data bidang ketentraman dan ketertiban serta linmas.

- p) Melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- q) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang.
- r) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data WNI keturunan dan WNA.
- s) Mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan ummat beragama.
- t) Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. untuk melakukan Pencegahan atas pengelolaan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
- v) Melakukan pencegahan dan penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, Zat adiktif dan bahan berbahaya.
- w) Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah.
- x) Melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban.
- y) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil Kerja Bawahan.
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi kesejahteraan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan skala prioritas sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas.

- d) Mengkonsultasikan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial yang bersifat Urgen kepada Camat melalui Sekertaris.
- e) Memberikan Saran dan Masukan kepada Camat melalui sekertaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya.
- f) Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan serta bantuan sosial, Kepemudaan, Peranan Wanita dan Olah Raga, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- g) Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- h) Menghimpun, menyusun dan mengolah data, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang kesejahteraan sosial.
- i) Melaksanakan urusan bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan, olah raga, peranan wanita, dan kehidupan beragama.
- j) Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemberdayaan lembaga Adat.
- k) Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang ketenaga kerjaan dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati
- l) Melaksanakan koordinasi program keluarga berencana (KB).
- m) Menghimpun dan menyusun data bantuan sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan.
- n) Menyiapkan bahan pembinaan bagi penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, tuna rungu, tuna susila dan panti asuhan.
- o) Menyiapkan bahan dan data untuk pengajuan permintaan bantuan bagi korban bencana serta pendistribusiannya.
- p) Menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan.

- q) Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial.
- r) Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan keperamukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan.
- s) Menyiapkan bahan pembinaan serta sosialisasi kesejahteraan keluarga peranan wanita dan organisasi kewanitaan.
- t) Melaksanakan pendataan mengenai angkatan tenaga kerja sebagai bahan pembinaan tenaga kerja.
- u) Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk.
- v) Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah, maupun luar sekolah dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan.
- w) Melaksanakan koordinasi pemberantasan wabah penyakit, imunisasi balita dan anak sekolah.
- x) Melaksanakan koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi, kegiatan posyandu.
- y) Menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana peribadatan dan krehidupan beragama.
- z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

VII. Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut:

- a) Memimpin, membimbing, meneliti hasil kerja bawahan.
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pelayanan Umum berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi pelayanan umum yang bersifat urgen kepada camat melalui sekretaris.

- e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f) Menyusun rencana dan pogram seksi pelayanan umum sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan, inventarisasi desa/ kelurahan, kebersihan, sarana dan prasarana umum.
- g) Menyusun rencana kerja, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan perizinan.
- h) Menginventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah dilingkup kecamatan.
- i) Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- j) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman.
- k) Menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan.
- l) Menghimpun dan mengolah data potensi wilayah sebagai bahan perencanaan dan pengembangan wilayah kecamatan.
- m) Meneliti dan melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perizinan serta menetapkan besaran retribusi.
- n) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelayanan perijinan dan non perijinan.
- o) Menginventarisasi kantor, rumah dinas, balai desa dan bangunan milik pemerintah lainnya.
- p) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa.
- q) Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah.
- r) Menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan.
- s) Menghimpun, mengolah data, dan membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.

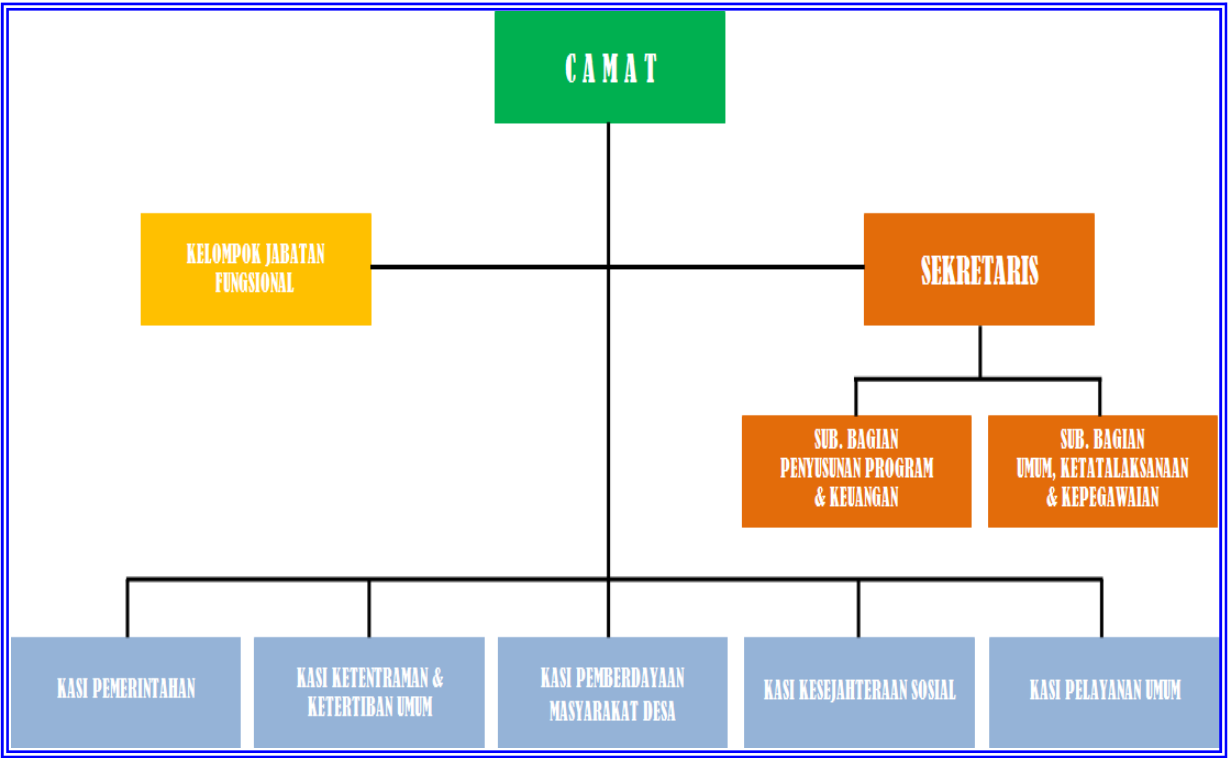
- t) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan
- u) Melakukan pemantauan terhadap pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan, drainase pedesaan dan pemukiman.
- v) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan daerah milik jalan dan saluran drainase, daerah milik irigasi dan sumber daya air
- w) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase.
- x) Mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum.
- y) Melaksanakan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi desa, jaringan tersier dan jaringan irigasi sumur pompa.
- z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Kecamatan Anggana mengacu pada peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat Camat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- f. Seksi Pelayanan umum.
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat.

Gambar 2

Struktur Organisasi Kecamatan Anggana



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mutlak diperlukan ketersediaan sumber daya Pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang dimiliki Kecamatan Anggana Kutai Kartanegara pada tahun 2025 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Anggana Menurut Golongan

Komposisi Pegawai secara keseluruhan jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Anggana sampai Juli Tahun 2025 adalah sebanyak 33 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Anggana adalah sebagaimana ditunjukkan table1 di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Anggana Menurut Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	0	0	0	0,00%
2	II	7	4	11	33,33%
3	III	9	10	19	57,57%
4	IV	2	1	3	9,1%
	Jumlah	18	15	33	100%

Pada tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 Laki-laki dan 15 wanita dengan dominasi pegawai di Golongan III sebanyak 19 orang.

b. Sumber Daya Manusia Kecamatan Anggana Menurut Kepangkatan
Data Pegawai Pada Kecamatan Anggana Berdasarkan Kepangkatan
Kepegawaian Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Data Pegawai Kecamatan Anggana menurut Kepangkatan

GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
I/a	0	0	0
I/b	0	0	0
I/c	0	0	0
I/d	0	0	0
Jumlah Gol.I	0	0	0
II/a	0	0	0
II/b	1	0	1
II/c	2	0	2
II/d	4	4	8
Jumlah Gol. II	7	4	11
III/a	0	0	0
III/b	3	5	8
III/c	0	1	1
III/d	6	4	10
Jumlah Gol. III	9	10	19
IV/a	1	1	2
IV/b	1	0	1
IV/c	0	0	0
IV/d	0	0	0
IV/e	0	0	0
Jumlah Gol. IV	0	0	0
TOTAL	18	15	33

Sumber: Bagian Kepegawaian Kecamatan Anggana, Agustus 2025

Menurut kepangkatan, Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi pangkat Penata Tingkat I sejumlah 10 orang.

c. Sumber Daya Manusia Kecamatan Anggana Menurut Tingkat Pendidikan

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Pendidikan didominasi oleh Tingkat Pendidikan Sarjana (S1)

Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Anggana Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
SD / SEDERAJAT	0	0	0
SMP / SEDERAJAT	0	0	0
SMA / SEDERAJAT	7	4	11
DIPLOMA I	0	0	0
DIPLOMA II	0	0	0
DIPLOMA III	1	1	2
DIPLOMA IV	0	0	0
SARJANA (S1)	6	9	15
PROFESI	0	0	0
PASCA SARJANA (S2)	4	1	5
DOKTOR (S3)	0	0	0
SMP Kejuruan	0	0	0
SMA Kejuruan	0	0	0
SMA Keguruan	0	0	0
TOTAL	18	15	33

Sumber: Bagian Kepegawaian Kecamatan Anggana, Juni 2025

Menurut tingkat pendidikan pegawai di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 15 orang.

- d. Sumber Daya Manusia Kecamatan Anggana yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Jabatan Eselon didominasi oleh Eselon IV. Total Pegawai yang menduduki jabatan eselon adalah 33. Pegawai dengan jabatan eselon III berjumlah 2 orang, sementara jabatan eselon IV hanya diisi oleh 6 orang. Dan di Kecamatan Anggana terdapat 1 Jabatan Esselon yang belum terisi sampai dengan saat ini yaitu Jabatan Kepala Seksi Kententruman dan Ketertiban Umum.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Anggana
Yang Menduduki Jabatan Esselon Tahun 2025

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	0,00%
2	II.b	0	0	0	0,00%
3	III.a	1	0	1	12,5%
4	III.b	0	1	1	12,5%
5	IV.a	2	2	4	50%
6	IV.b	1	1	2	25%
Jumlah		4	4	8	100%

Sumber: Bagian Kepegawaian Kecamatan Anggana, Juni 2025

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana /Aset Kecamatan Anggana

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
01.03	ASET TETAP	18.918.988.888,50
	TANAH	924.990.000,00
	TANAH	924.990.000,00
	PERALATAN DAN MESIN	5.097.964.174,50
	ALAT BESAR	654.642.000,00
	ALAT ANGKUTAN	1.646.737.700,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	27.742.000,00
	ALAT PERTANIAN	9.150.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.465.641.974,50
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	269.508.690,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2.725.000,00
	ALAT LABORATORIUM	27.090.400,00
	ALAT PERSENJATAAN	55.895.550,00
	KOMPUTER	901.530.860,00
	ALAT EKSPLORASI	31.450.000,00
	PERALATAN OLAH RAGA	5.850.000,00
	GEDUNG DAN BANGUNAN	6.906.937.964,00
	BANGUNAN GEDUNG	6.605.948.261,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	300.989.703,00
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	5.930.134.750,00
	JALAN DAN JEMBATAN	5.509.270.750,00
	BANGUNAN AIR	361.064.000,00
	JARINGAN	59.800.000,00
	ASET TETAP LAINNYA	9.900.000,00
	TANAMAN	9.900.000,00
01.05	ASET LAINNYA	608.191.948,50
	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0
	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TIDAK BERWUJUD	50.550.000,00
	ASET LAIN-LAIN	557.641.948,50

Sumber : Simda BMD Kecamatan Anggana 2025

2.1.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Anggana

Kecamatan Anggana menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada Masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa, Kelurahan karena keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Anggana berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja Pelayanan SKPD tahun 2024 yaitu Sangat Baik yaitu sebesar 93,36 dan atau indikator lainnya disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Indikator Tujuan:																
Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	A			100	100	100		
Indikator Sasaran:																
Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	70	70	70	70	70	70	70			100	100	100		
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	50	50	50	50	50	n.a	n.a	44			0	0	80		
Indikator Program, Kegiatan & Sub Kegiatan:																
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	70	70	80	80	n.a	71	44	59		n.a	101	62,85	73,75	
Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	10	10	10	10	10	10	10	-		100	100	100		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	-		100	100	100		
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	-		100	100	100		
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	-		100	100	100		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2			100	100	100		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	2	2	0	0	0			0	0	0		
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	data	0	-0	0	200	200	0	0	0			0	0	0		
Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	-0	0	0	25	25	0	0	0			0	0	0		
Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	14	14	14	14	14	14	14	14			100	100	100		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	37	37	37	37	33	33	33			100	100	100		
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2			100	100	100		
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	0	0	0	2	2	0	0	0	-	-	100	100	100		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	331	331	331	331	331	331	331	331			100	100	100		
Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2			100	100	100		
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	1	1	0	0	1			0	0	100		
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	0	1	1	0	0	1			0	0	100		
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2			100	100	100		
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	1	1	0	0	1			0	0	100		
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	43	43	43	43	43	0	33	0	33		0	75	0		
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	1	-	1	-		1		1		100	100	100		
Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Layanan	8	8	8	8	8	8	8	8			100	100	100		
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	102	102	102	102	102	102	102	102			100	100	100		
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip	500	500	500	500	500	500	500	500			100	100	100		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	10	18	18	18	18	12	12	10							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	0			100	100	100		
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	10	10	10	10	10	10			100	100	100		
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	0			100	100	100		
Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	115	115	115	115	115	21	24	24			18,26	20,86	20,86		
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	10	10	10	10	13	13			100	130	130		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	104	104	104	104	104	10	10	10			9,61	9,61	9,61		
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	70	70	70	80	80	100	100	100			100	100	100		
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3			100	100	100		
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2			100	100	100		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	100	100	100		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100	100	100		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	4			100	100	100		
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
Jumlah peserta Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peserta	150	150	150	150	150	200	200	200			133	133	133		
Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	5	5	5	5	5	5			100	100	100		
Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	8	8	8	8	8	8	8	8			100	100	100		
Jumlah Desa Yang didampingi diwilayahnya	Desa	8	8	8	8	8	8	8	8			100	100	100		
Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	8	8	8	8	8	8	8	8			100	100	100		
Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	0	0	0	0	0	1	0	0			0	100	0		
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	n.a	0	0	0	0	1	0	0			0	100	0		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	n.a	0	0	4	4	0	0	0			0	0	0		
Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	n.a	0	0	2	2	0	0	0			0	0	0		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	n.a	0	0	500	500	0	0	0			0	0	0		
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	n.a	0	0	1	1	0	0	0			0	0	0		

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan target pada Renstra periode 2021 – 2026 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai dan untuk indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan tidak terealisasi dikarenakan pemungutan retribusi yang ada di Kecamatan sudah dipindah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain:

1. adanya sumber dana yang cukup dari APBD
2. Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
3. merupakan hasil kerjasama Tim seluruh aparatur di lingkup Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kecamatan Anggana menghadapi perubahan yang signifikan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Peningkatan kebutuhan infrastruktur, pertumbuhan populasi, serta tekanan pada sumber daya alam menjadi perhatian utama dalam penyusunan rencana strategis in

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Anggana
Kabupaten Kutai Kartanegara

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kecamatan Anggana	26.556.337.372	74.970.929.535	60.706.218.505	45.584.375.395	22.064.229.586	25.975.560.443	72.018.867.557	59.052.411.299	-	-	97,81	96,06	97,28	-		0,317	0,315
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.913.529.372	7.659.565.485	6.414.282.475	7.247.310.395	6.380.939.586	5.311.153.624	6.807.636.883	5.740.913.997	-	-	89,81	88,88	89,50			0,027	0,026
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	335.000.000	322.500.000	605.000.000	320.000.000	76.866.991	74.314.654	288.524.730		-	96,08	22,18	89,47			0,592	0,554
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	240.000.000	227.500.000	140.000.000	40.000.000	9.298.500	20.042.354	212.639.729		-	92,99	8,35	93,47			1,834	1,838
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	-	8.633.250	9.738.450	8.074.791		-	86,33	97,38	80,75			-	-0,022
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	-	9.902.000	9.803.850	3.080.000		-	99,02	98,04	30,80			-	-0,322
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	75.000.000	75.000.000	70.000.000	30.000.000	49.033.241	34.730.000	64.730.210		-	98,07	46,31	86,31			0,145	0,097
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-				
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	300.000.000	250.000.000	-	-			-	-	-	-				

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.337.888.469	4.006.642.519	5.023.492.524	4.677.227.458	5.124.732.900	3.819.544.173	3.769.568.242	4.439.584.495	-	-	88,05	94,08	88,38	-	-	0,050	0,051
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.251.568.469	3.919.492.844	4.936.342.849	4.523.907.458	5.021.412.900	3.734.297.173	3.684.722.842	4.358.744.495	-	-	87,83	94,01	88,30	-	-	0,051	0,053
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	-	8.927.000	8.525.400	4.520.000	-	-	89,27	85,25	45,20	-	-	-	-0,203
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	76.320.000	77.149.675	77.149.675	103.320.000	103.320.000	76.320.000	76.320.000	76.320.000	-	-	100,00	98,92	98,92	-	-	0,004	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.600.000	38.600.000	38.600.000	255.000.000	80.000.000	38.280.000	37.880.000	37.790.000	-	-	99,17	98,13	97,90	-	-	-	-0,004
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	-	4.680.000	4.280.000	4.190.000	-	-	93,60	85,60	83,80	-	-	-	-0,036
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	150.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	50.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000	33.600.000	33.600.000	-	-	33.600.000	33.600.000	33.600.000		-	100,00	100,00	100,00			-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	97.000.000	-	43.000.000	-	-	94.880.000	-	-	-	-	97,81	-				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	97.000.000	-	43.000.000	-		94.880.000	-		-	-	97,81	-				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.548.923	378.618.923	272.986.937	304.291.923	230.304.986	321.814.694	360.518.471	265.720.500		-	97,65	95,22	97,34			-0,061	-0,062
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.613.986	21.563.986	50.000.000	97.216.986	5.304.986	22.068.000	19.254.635	44.675.000		-	93,45	89,29	89,35			0,284	0,265
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.031.400	4.490.100	3.883.500		-	20,63	89,80	77,67			-	0,556
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.098.000	54.068.000	50.000.000	34.088.000	130.000.000	54.538.000	40.216.000	49.953.000		-	98,98	74,38	99,91			-0,032	-0,029
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.826.937	282.986.937	152.986.937	152.986.937	75.000.000	229.338.994	281.794.736	152.870.000		-	99,79	99,58	99,92			-0,127	-0,126
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.010.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.838.300	14.763.000	14.339.000		-	92,68	98,42	95,59			-0,021	-0,011
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	343.350.000	1.319.074.500	-	675.000.000	50.000.000	330.922.185	1.296.867.100	-		-	96,38	98,32	-			-1,000	-1,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		632.500.000				-	615.090.000	-			-	97,25					

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	206.440.000	180.000.000	-	180.000.000	-	200.808.185	178.757.100	-		-	97,27	99,31	-			-1,000	-1,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.910.000	506.574.500	-	50.000.000	50.000.000	130.114.000	503.020.000	-		-	95,04	99,30	-			-1,000	-1,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	445.000.000	-	-	-	-		-	-		-				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.289.980	465.835.643	596.703.014	612.591.014	500.071.700	377.673.312	444.915.206	560.342.327		-	88,39	95,51	93,91			0,118	0,141
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.746.966	272.387.046	405.160.000	426.148.000	436.801.700	188.898.782	254.336.884	371.183.131		-	80,13	93,37	91,61			0,198	0,253
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.543.014	193.448.597	191.543.014	186.443.014	63.270.000	188.774.530	190.578.322	189.159.196		-	98,55	98,52	98,76			-	0,001
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.852.000	1.018.793.900	160.000.000	75.200.000	75.830.000	346.052.269	728.693.210	148.951.945		-	96,97	71,53	93,09			-0,235	-0,245
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	31.210.000	88.793.900	50.000.000	25.200.000	25.830.000	26.773.269	86.174.610	41.173.845		-	85,78	97,05	82,35			0,170	0,154
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-			-		-	-		-				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	325.642.000	930.000.000	110.000.000	50.000.000	50.000.000	319.279.000	642.518.600	107.778.100		-	98,05	69,09	97,98			-0,304	-0,304
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	20.415.948.000	66.658.024.050	53.330.736.001	37.291.065.000	14.868.290.000	20.291.569.169	64.415.204.784	52.492.184.802		-	99,39	96,64	98,43			0,377	0,373

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DAN PELAYANAN PUBLIK																	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	400.000.000	400.000.000		-			-	-		-				
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	150.000.000	150.000.000	-	-			-	-		-				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	250.000.000	250.000.000	-	-			-	-		-				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-			-	-		-				
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-			-	-		-				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.415.948.000	66.658.024.050	53.330.736.001	36.791.065.000	14.368.290.000	20.291.569.169	64.415.204.784	52.492.184.802		-	99,39	96,64	98,43			0,377	0,373
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	-	2.593.059.950	-	741.065.000	768.290.000	-	1.247.673.633	-		-	-	48,12	-				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20.415.948.000	64.064.964.100	53.330.736.001	36.050.000.000	13.600.000.000	20.291.569.169	63.167.531.151	52.492.184.802		-	99,39	98,60	98,43			0,377	0,373

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	226.860.000	653.340.000	395.000.000	686.000.000	370.000.000	215.009.150	608.638.890	346.901.500		-	94,78	93,16	87,82			0,203	0,173
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	226.860.000	653.340.000	395.000.000	200.000.000	100.000.000	215.009.150	608.638.890	346.901.500		-	94,78	93,16	87,82			0,203	0,173
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	205.850.000	633.340.000	370.000.000	50.000.000	50.000.000	193.999.500	588.728.890	322.006.500		-	94,24	92,96	87,03			0,216	0,184
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.010.000	20.000.000	25.000.000	150.000.000	50.000.000	21.009.650	19.910.000	24.895.000		-	100,00	99,55	99,58			0,060	0,058
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	486.000.000	270.000.000	-	-				-	-	-				
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				486.000.000	270.000.000	-	-			-	-	-	-				
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	175.000.000	175.000.000	-					-	-	-				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	175.000.000	175.000.000	-	-			-	-	-	-				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	50.000.000	-	-			-	-	-	-				
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	175.000.000	125.000.000	-	-			-	-	-	-				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	225.365.393	193.145.393	169.000.029	-	75.000.000	157.828.500	187.387.000	155.226.000		-	70,03	97,02	91,85			-0,091	-0,006

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	225.365.393	193.145.393	169.000.029	-	75.000.000	157.828.500	187.387.000	155.226.000		-	70,03	97,02	91,85			-0,091	-0,006
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					75.000.000	-				-	-		-				
Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	74.155.393	73.145.393	49.000.029		-	68.118.500	72.387.000	42.226.000		-	91,86	98,96	86,18			-0,129	-0,147
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	151.210.000	120.000.000	120.000.000			89.710.000	115.000.000	113.000.000			59,33	95,83				-0,074	0,080
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	397.200.000	185.000.000	195.000.000			317.185.000		-	-		79,86				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	397.200.000	185.000.000	195.000.000	-	-	317.185.000		-	-		79,86				
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	372.200.000	180.000.000	180.000.000	-	-	295.345.000		-	-		79,35				
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	25.000.000	5.000.000	15.000.000	-	-	21.840.000		-	-		87,36				

Adapun Sumber keuangan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Anggana adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Tabel di atas menyajikan data anggaran berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan data realisasi berdasarkan pagu anggaran DPA, ada tiga program utama Kecamatan Anggana dari tahun 2022 hingga 2026. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik diatas 90%, pada 2023.

Secara keseluruhan, Kecamatan Anggana menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat penurunan alokasi pada beberapa program karena adanya Pemekaran Wilayah dan penyesuaian anggaran pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara antara tahun 2021 s/d 2026 cukup baik dengan rata-rata penyerapan di atas 76%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Anggana sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kerjasama tim pengelola anggaran yang memadai baik Pengguna Anggaran, Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penatausahaan Keuangan di Kecamatan Anggana.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran di beberapa Sub Kegiatan dan tidak bisa 100% seperti seperti penyediaan jasa komunikasi dan Listrik, Belanja Gaji dan Tunjangan dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.

2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Anggana yaitu:

- Penduduk kecamatan: Semua individu yang terdaftar sebagai penduduk di wilayah kecamatan.
- Perangkat daerah: aparaturnya pemerintah kecamatan dan kelurahan/ Desa
- Organisasi kemasyarakatan: Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, PKK, dan lain-lain.
- Dunia usaha: Pelaku bisnis dan industri kecil di kecamatan.
- Kelompok rentan: Termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
- Pihak lain yang membutuhkan pelayanan: Institusi pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain.

2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Anggana dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Anggana maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Anggana antara lain:

- a. Polsek Kecamatan Anggana, untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Koramil Anggana, untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Kantor Urusan Agama, untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu jika pernikahan mendadak ingin dilakukan dari batas waktu pengurusan administrasi yang sudah ditentukan.
- d. Satpol PP,
- e. Kesbangpol,
- f. Damkar,
- g. BPBD,
- h. Dinas Pertanian dan Perkebunan
- i. DP3A,
- j. Perkim,
- k. DLHK,

- l. Rumah Sakit dan Puskesmas, untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- m. Bappeda, untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Anggana berjalan dengan baik dan terarah.
- n. DPMD, untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa/Kelurahan dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa dan Kelurahan.
- o. Disdukcapil, mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- p. Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan, meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK di Tingkat RT. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Anggana.
- q. Inspektorat, untuk kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta evaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dari Kecamatan.
- r. Bapenda, mitra kerja pelayanan di kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah.
- s. Dinas Sosial, mitra pelayanan di kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.
- t. Dinas Koperasi, mitra kerja dengan terkait UMKM dalam bentuk pembinaan, seperti pelatihan, bantuan permodalan, pendampingan izin usaha, serta fasilitas pengembangan dan perlindungan usaha.

- u. Dinas Perhubungan, mitra kerja yaitu terkait dengan LPJU dan Transportasi pada wilayah Kecamatan.
- v. Diskominfo,

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Masyarakat Kecamatan Anggana sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Anggana adalah “Meningkatnya layanan administrasi kecamatan” Pelayanan dapat dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Anggana yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Anggana. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan an tara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Anggana maka dapat dirumuskan permasalahan di wilayah ini. Permasalahan kecamatan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal yaitu pokok masalah, masalah, dan akar masalah.

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Kecamatan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pelayanan Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Kurangnya pemahaman Kebijakan/Regulasi baik berupa delegasi maupun pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
		Masih minimnya infrastruktur yang mendukung dalam pelayanan publik khususnya berbasis digital
		Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus dalam memberikan pelayanan
		Kurangnya harmonisasi kebijakan lintas sektor yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik.

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Sosialisasi kebijakan atau program kecamatan yang belum merata
		Adanya hambatan proses pencetakan e-KTP karena mesin rusak
	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan dan kabupaten (perangkat daerah teknis)
		Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.
		Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
		Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Belum optimalnya koordinasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait
		Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
		Keterbatasan infrastruktur teknologi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan
		Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang rendah sehingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
		Keterbatasan akses jalan menuju kantor kecamatan atau desa tertentu
		Belum tersedianya transportasi umum yang memadai untuk menuju kecamatan, hanya tersedia moda transportasi antar kota.
		Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
		Belum optimalnya pembinaan koperasi dan UMKM bersama dengan dinas teknis
		Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan desa yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas daerah dan nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, stunting, dll
		Kerusakan ekosistem akibat penambangan batubara ilegal di sekitar Waduk Anggana
	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Belum optimalnya peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola pendapatan asli desa
		Masih terbatasnya pembinaan terhadap aparatur desa

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
		Minimnya pelaksanaan forum atau pertemuan rutin untuk membahas program lintas sektoral di tingkat kecamatan
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di kecamatan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan internal pemma.
		Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis.
		Kurangnya pelatihan bagi perangkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern, termasuk pengelolaan keuangan.
		Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan kecamatan
		Tidak adanya sistem pencatatan data yang terintegrasi secara real-time.
		Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Sumber: hasil analisis, 2025

2.2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penentuan isu strategis Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mempertimbangkan permasalahan, isu KLHS, serta isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional).

Sebelum perumusan isu strategis kecamatan, berikut ini dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, serta beberapa aspek lainnya.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan dimulai dengan merumuskan Visi, Misi, dan nilai nilai. Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai instansi, memiliki orientasi kedepan agar dapat eksis, bersifat antisipatif, dan inovatif.

Adapun Visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditetapkan sebagai berikut:

” Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan “

Misi merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visinya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh perangkat daerah dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Sedangkan *Misi* yang diemban untuk mencapai Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih diatas selanjutnya dijabarkan dalam 17 Program Dedikasi yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:

Gambar 3
17 Program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

17 PROGRAM DEDIKASI



Misi#1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia; Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik Program Etam Sejahtera
Misi#3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.	Program Pelayanan Publik Cerdas Program ASN Kukar Terbaik
Misi#5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik. Program Internet Desa Gratis. Program Permukiman Idaman Terbaik.
Misi#2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh Program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah. Program Stimulus Komunitas Kreatif
Misi#4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.	Program RT Ku-Terbaik Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku. Program Jaga Lingkungan Lestari

Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan tugas dan fungsi, maka kecamatan mendukung secara langsung program dedikasi Misi#3 :

- Program Pelayanan Publik Cerdas.
- Program ASN Kukar Terbaik.

Program dedikasi Misi#4:

- Program RT-ku Terbaik.
- Program Terima Kaseh Guru Nagji Ku.
- Program Jaga Lingkungan Lestari

Selain itu, kecamatan juga mendukung secara tidak langsung terhadap program-program dedikasi lainnya. Adapun penjelasan kedua program dedikasi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

- Program Pelayanan Publik Cerdas

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan publik, dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi sebagai pendorong dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *smart and good governance* hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan kegiatan prioritas adalah pembangunan mini mall pelayanan publik cerdas pada setiap kecamatan yang diintegrasikan dengan konsep kecamatan sebagai Pusat Data dan Layanan Informasi.

b. Program ASN Kukar Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan kepada Seluruh ASN di Kutai Kartanegara dalam rangka memberikan *reward dan punishment* sebagai langkah kongkrit untuk perbaikan tata kelola Pemerintah yang baik untuk selalu berbenah baik dalam pelayanan masyarakat dan birokrasi

c. Program RT Ku-Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran lembaga RT sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan warga, dengan memperkuat Program 50 Juta per RT, menjadi minimal 150 Juta Per-RT dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, program ini diarahkan pada penguatan hubungan sosial kemasyarakatan, keamanan, keagamaan, bina lingkungan, prasarana dan sarana umum pada skala RT, serta memperkuat penyediaan data administrasi kependudukan yang lebih aktual dan valid yang dikemas dalam program-program swakelola tematik sesuai dengan hasil musyawarah RT yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal mengawal proses pelaksanaan program, maka diperkuat dengan peningkatan kapasitas Pendekar Idaman, dengan pola kerja yang terstruktur, responsif, cakap dalam mengelola dinamika pembangunan desa/kelurahan secara bertanggung jawab. Khusus untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, maka diperkuat dengan optimalisasi aparat keamanan di tingkat satuan wilayah terkecil (desa/kelurahan) yakni Penyediaan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas, serta untuk memperkuat aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, maka alokasi RT dapat menunjang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memberikan bantuan operasional/insentif, selanjutnya pola distribusi alokasi program per RT diperkuat pula dengan pengalokasian anggaran per tahun secara proporsional berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), dengan alokasi minimal sebesar Rp. 1 Juta per KK.

d. Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku

Dalam rangka mendukung program dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang merupakan wujud nyata dari pelaksanaan program Gerakan Etam Mengaji baik di lingkungan ASN, maupun di Lingkungan Masyarakat Kukar dimulai dari Keluarga melalui musholla, TPA, Lembaga LPTQ, event

MTQ baik dari tingkat Desa/Kelurahan. Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Program ini juga mendukung pengentasan buta huruf Hijaiyah, dan meningkat masyarakat pandai membaca Al qur'an di Kutai Kartanegara

e. Program Jaga Lingkungan Lestari

Merupakan Program Kukar Idaman Terbaik, yang berorientasi Kelestarian Alam dan berwawasan Lingkungan yang wajib di jaga untuk kelangsungan Hidup dan masa depan dari dampak kerusakan dan bencana alam.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup diwilayah Kecamatan adalah Proses evaluasi dan analisis terhadap rencana tata ruang wilayah kecamatan, yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan berkelanjutan. Ini mencakup penilaian kesesuaian rencana dengan kondisi lingkungan, potensi dampak, serta upaya mitigasi dan pelestarian lingkungan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu:

- Kegiatan Pasca Tambang Belum Dilakukan dengan Baik

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama tambang batubara, meninggalkan banyak lahan dengan karakteristik pasca tambang yang merusak. Lubang besar, penurunan muka tanah, dan potensi longsor menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan lingkungan hidup. Proses reklamasi yang seharusnya menjadi kewajiban belum terlaksana optimal, menyebabkan gangguan ekologis jangka panjang serta memperparah kerusakan lahan dan menurunkan nilai produktivitas wilayah.

- Kerusakan Hutan Dan Lahan

Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami tingkat kerusakan hutan dan perubahan lahan yang cukup tinggi. Penebangan liar, perambahan lahan, dan kegiatan pertambangan ilegal menjadi penyebab utama degradasi kawasan hutan yang luasnya mencapai lebih dari 83% dari total wilayah kabupaten. Dari kawasan ini, sekitar 52% merupakan hutan produksi yang semestinya dijaga keberlanjutannya. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan ekosistem hutan rentan rusak dan kehilangan fungsi ekologis

- Perubahan Lingkungan Sekitar Perairan Sungai dan Danau

Perubahan lingkungan juga terlihat nyata di wilayah perairan, pesisir, dan danau. Ekosistem mangrove di Delta Mahakam rusak parah, menyebabkan abrasi meningkat hingga 10 kali lipat dari biasanya. Intrusi air laut di DAS Mahakam memperburuk kualitas air minum masyarakat. Di wilayah 3 danau (Jempang, Semayang, dan Melintang), menurunnya vegetasi air, kualitas air yang tercemar, serta pendangkalan sungai telah mengganggu sistem hidrologi dan keanekaragaman hayati. Kondisi ini diperparah oleh pembangunan permukiman dan konversi lahan yang tidak terkendali.

- Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan menjadi isu krusial yang perlu segera diantisipasi. Banyak lahan pertanian produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralih menjadi kawasan tambang, industri, maupun permukiman tanpa perencanaan yang komprehensif. Hal ini mengancam ketahanan pangan daerah dan menurunkan daya dukung lingkungan. Ketidadaan regulasi spesifik di tingkat kabupaten mengenai pembatasan alih fungsi lahan memperburuk kondisi, dan menyebabkan konflik ruang serta ketidakseimbangan pembangunan wilayah.

3. Potensi Kecamatan Anggana

Kecamatan Anggana memiliki potensi yang sangat beragam dan strategis, diantaranya:

A. Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam:

- Pertanian dan Perkebunan: Potensi besar sebagai lumbung padi dan perkebunan sawit di beberapa desa antara lain Desa Sidomulyo, Handil Terusan, Kutai Lama.
- Perikanan dan Kelautan : Potensi perikanan di Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, sangat melimpah, terutama pada sektor perikanan laut dan air tawar, yang ditandai dengan hasil tangkapan udang dan berbagai jenis ikan yang tinggi. Anggana dikenal sebagai sentra produksi ikan dan udang, serta memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi melalui sektor perikanan tangkap dan hilirisasi produk perikanan.

Potensi Utama

- Perikanan Laut: Kecamatan Anggana memiliki potensi besar dalam perikanan laut, dengan hasil tangkapan yang beragam, termasuk udang. Yang dikelola oleh Masyarakat Nelayan pengepul, nelayan

tangkap, tambak serta pihak Swasta antara lain : PT.SYAM SURYA MANDIRI

- Perikanan Air Tawar: Sektor perikanan air tawar juga menjadi bagian penting dari potensi perikanan Anggana, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan perikanan laut.
- Produksi Unggulan: Anggana merupakan salah satu sentra produksi ikan dan udang yang signifikan di wilayah Kutai Kartanegara.
-
- Pertambangan dan Industri: Keberadaan industri gas, minyak, batu bara, yang dikelola pihak Swasta dan BUMN antara lain : PHM, PHSS, Pertamina EP di sektor migas, di Sektor Pertambangan antara lain : SKN, Bara Kumala, ADP
- Sektor Pariwisata: Destinasi alam menarik seperti Wisata Bukit Jahetan Layar, KPJ Play land, wisata Mangrove Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana.

B. Memiliki Posisi Strategis, terletak di wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara geografis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Samarinda dan Selat Makassar. Sebagian wilayah Kecamatan Anggana, membuka peluang signifikan untuk pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik di masa depan.

4. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan Kecamatan

Beberapa isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu: Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN, Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor).

5. Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD

- Aspek Global: Intinya adalah dampak perubahan iklim (seperti banjir, kekeringan) dan tekanan dari permintaan pasar dunia untuk

sumber daya alam (misal: sawit, batubara) yang memengaruhi lingkungan Anggana.

- Aspek Nasional: Intinya adalah dampak besar dari pembangunan IKN (misal: perubahan lahan, peningkatan sampah, tekanan penduduk) dan pengaruh kebijakan nasional terkait energi/lingkungan terhadap Anggana.
- Aspek Regional: Intinya adalah masalah lingkungan lokal dan antar wilayah seperti pencemaran sungai, masalah sampah, dan kejadian banjir yang sering terjadi di sekitar Anggana dan Kalimantan Timur.
- Pengelolaan Sampah: Volume sampah yang tinggi (sekitar 35,7 ton per hari) dengan belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai, kurangnya regulasi pengelolaan sampah, dan adanya tempat pembuangan sampah ilegal.
- Kualitas Air Sungai: Penurunan kualitas mutu air Sungai Mahakam yang dikategorikan "tercemar sedang" hingga "tercemar parah" di beberapa titik, mengancam ketersediaan air bersih.
- Banjir: Permasalahan banjir yang masih sering terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak perubahan tata guna lahan atau dampak pembangunan infrastruktur yang kurang terencana (termasuk yang terkait IKN, seperti longsor dan jalan terbelah).

6. Isu Strategis Perangkat Daerah (Kecamatan Anggana)

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*excellent service*) yang cepat, mudah, murah, efisien, dan transparan, serta berbasis elektronik.
- Peningkatan Infrastruktur: Prioritas perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan yang masih sangat minim di beberapa wilayah.
- Kemiskinan dan Stunting: Tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting menjadi isu strategis yang membutuhkan program penanggulangan terkoordinasi dan efektif.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Kebutuhan untuk mengelola potensi daerah secara berkelanjutan, mengatasi permasalahan lingkungan akibat eksploitasi (terutama batubara), dan memastikan kelestarian ekosistem.

- Tata Kelola Pemerintahan: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis elektronik dan peningkatan kompetensi aparatur.

Berdasarkan pemaparan gambaran umum pelayanan, identifikasi permasalahan, serta analisis mendalam terhadap berbagai isu strategis—termasuk dimensi KLHS dan isu lingkungan dinamis pada skala global, nasional, dan regional—dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Anggana memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius. Pemahaman menyeluruh terhadap kondisi eksisting dan proyeksi isu ke depan ini menjadi landasan krusial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Anggana. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah menetapkan visi dan misi yang jelas, serta merancang program kerja yang adaptif dan solutif untuk mencapai pembangunan Kecamatan Anggana yang lebih maju dan berkelanjutan dalam periode 2025-2029. Adapun teknik penyimpulan Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.0 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Ketahanan Pangan	Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	Rendahnya Produktivitas	Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi	Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN	Dampak dan Peluang IKN
Memiliki posisi yang strategis (dekat dengan IKN)	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat			Pemerataan Pembangunan Wilayah	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam, antara lain Pertanian dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Kehutanan, Pariwisata, serta Pertambangan dan Industri	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkunagn hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marginal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar		Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas	Peningkatan Layanan Infrastruktur
Tingginya partisipasi masyarakat yang berkolaborasi & terlibat Komunitas dalam Pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat			Kemiskinan dan Stunting
Desa Mandiri sebagai Pilar Ketahanan Sosial yang cukup kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ekosistem Pesisir sebagai “Karbon Biru” & Keanekaragaman Hayati Penguatan Regulasi Lingkungan Terbaru		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan					Tata Kelola Pemerintahan
		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor)					
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		

Sumber: hasil analisis, 2025

Penjelasan masing-masing isu strategis Kecamatan Anggana dalam kurun waktu 2025 –2029, adalah sebagai berikut:

1. Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sistem pelayanan publik di Kecamatan Anggana masih banyak yang dilakukan secara manual, yang menghambat efisiensi dan transparansi. Dalam era digitalisasi ini, penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Pemerintah kecamatan harus segera melakukan digitalisasi administrasi dan pelayanan publik dengan mengadakan perangkat keras dan lunak yang memadai. Selain itu, pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan aplikasi pelayanan publik sangat diperlukan. Aplikasi pelayanan publik ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, perizinan, pengelolaan data penduduk, serta mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, program, dan layanan pemerintah.

2. Peningkatan Layanan Infrastruktur

Meskipun Kecamatan Anggana memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, infrastruktur dasar di wilayah ini masih terbatas. Beberapa jalan penghubung antar desa dalam kondisi rusak, fasilitas pelayanan publik kurang memadai, dan akses internet yang terbatas menjadi masalah utama. Kondisi ini menghambat perkembangan ekonomi, akses pendidikan, serta kualitas pelayanan publik.

Untuk mengatasi masalah ini dalam lima tahun mendatang, pemerintah kecamatan perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi perbaikan jalan antar desa, peningkatan fasilitas kantor kecamatan dan kelurahan, serta perluasan jaringan internet untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah juga perlu melakukan perencanaan yang matang dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta sektor swasta untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan Kecamatan Anggana dapat menjadi

kawasan yang lebih terhubung, efisien, dan siap menyambut tantangan pembangunan di masa depan.

3. Kemiskinan dan Stunting

Kemiskinan dan stunting masih menjadi tantangan terberat baik itu pemerintah pusat dan daerah. Kemiskinan berkontribusi signifikan terhadap tingginya kasus stunting karena membatasi akses keluarga

terhadap gizi yang memadai, layanan kesehatan, dan sanitasi yang bersih. Kemiskinan menciptakan masalah serius di mana ketidakmampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan dasar pada ibu hamil dan anak-anak, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, yang pada akhirnya menyebabkan stunting. Dengan adanya pengembangan potensi kewilayahan, diharapkan Kecamatan Anggana bisa memanfaatkan peluang besar ini. Mengurangi kemiskinan dengan menyediakan banyak lapangan pekerjaan melalui UMKM-UMKM yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit masalah kemiskinan bisa berkurang, seiring dengan berkurangnya

kemiskinan maka masalah stunting pun bisa teratasi. Selain mengembangkan perekonomian masyarakat, pihak kecamatan pun perlu bekerjasama dengan instansi terkait untuk mencegah stunting, karena mengatasi kemiskinan dan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif, kegiatan yang bisa dilakukan seperti diversifikasi pangan yaitu mendorong pangan lokal yang beragam dan bergizi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan seperti beras, peningkatan akses layanan dasar dan meningkatkan peran perempuan serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran gizi, sanitasi dan kebersihan.

4. Pengembangan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan hidup

Kecamatan Anggana memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan, perkebunan, dan perikanan. Sektor ekonomi lokal di Kecamatan Anggana, seperti pertanian, perikanan,

dan UMKM, menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya akses ke modal, teknologi, dan pasar. Hal ini menghambat potensi sektor-sektor tersebut untuk berkembang lebih pesat.

Pemerintah kecamatan perlu mendorong investasi di sektor hilir, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Program-program pelatihan berbasis kebutuhan lokal juga harus diadakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, memperkuat koperasi sebagai wadah untuk pelaku UMKM dalam mengakses modal dan pasar perlu menjadi prioritas. Peningkatan akses ke pasar regional dan nasional juga harus dilakukan melalui penguatan infrastruktur transportasi dan promosi produk lokal, sehingga masyarakat Anggana dapat lebih mudah memasarkan hasil pertanian dan perikanannya.

Namun, eksploitasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, terutama pada kawasan pesisir dan sungai. Kontaminasi air akibat limbah domestik dan industri merupakan salah satu masalah besar yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar.

Untuk menghadapi masalah ini dalam lima tahun ke depan, pemerintah kecamatan akan melakukan rehabilitasi lahan kritis khususnya pada lahan bekas tambang. Hal ini diupayakan dengan berkoodinasi dengan perangkat daerah teknis dan pihak lain termasuk peran masyarakat dan swasta. Program edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pelestarian lingkungan juga akan ditingkatkan, baik kepada masyarakat umum maupun pelaku industri dan usaha.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam menghadapi tantangan pengembangan kewilayahan tentunya tata kelola pemerintahan menekankan bagaimana semua proses, lembaga, dan praktik digunakan untuk mengatur isu publik secara transparan, akuntabel, dan efisien, demi melayani masyarakat dengan baik dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam pembangunan .

Kecamatan Anggana perlu evaluasi dan peningkatan dalam hal pelayanan publik, mulai dari penyediaan sumber daya manusia yang smart dan profesional, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sarana prasarana pendukung demi lancarnya pelayanan yang diberikan.

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti kompleksitas di mana implementasi tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan banyak aspek dan memerlukan intervensi yang kompleks, selanjutnya perlu adanya komitmen dan sinergi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama serta setiap daerah memiliki permasalahan pemerintahan yang berbeda, sehingga implementasi tata kelola harus disesuaikan dengan konteks lokal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Anggana dilakukan dengan konsep seperti gambar berikut:

Gambar 4



Hubungan antara tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Tujuan dan sasaran dicapai dengan beberapa strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Anggana

a. Tujuan Renstra Kecamatan Anggana

Tujuan Renstra Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Kecamatan Anggana menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Meningkatnya kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Anggana, yaitu memberikan pelayanan yang prima di wilayah kecamatan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu "Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara." Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan Renstra Kecamatan Anggana mendukung sasaran RPJMD: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang berada pada tujuan 2 RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing.

b. Sasaran Renstra Kecamatan Anggana

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun sasaran strategis Kecamatan Anggana adalah "Meningkatnya kualitas layanan administrasi di kecamatan".

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing

perangkat daerah secara mikro. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra perangkat daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 5



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NSPK: Dasar hukum dari bab 1 terkait kecamatan dan kelurahan/desa	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	n/a	3,65	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi total jumlah Pelayanan dikali 100

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang tertib			Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan yang tertib dan Baik	n/a	70	71	71	72	72	75	Jumlah Desa yang tertib administrasi dan keuangan Penilaian Keuangan: 1. Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskuedes web (20%) Cara hitung: (jumlah desa tepat waktu / jumlah desa di kecamatan). 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdес secara 100% (15%) Cara Hitung: Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi/jumlah desa dikec 3. Persentasi realisasi anggaran (20%) Cara Hitung: jumlah anggaran yang terlaksana 100% / jumlah anggaran desa Penilaian Administrasi: 1. Penyampaian Perdes LPPDes, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret (10%) cara Hitung: jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret/ jumlah desa di kec 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) Cara Hitung: Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa 3. Pengisian Prosdekel dan Sdgs (10%) cara hitung: Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS/jumlah semua desa 4. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%) . Cara hitung: Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan/ jumlah semua desa di kec)

3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang konferhensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Anggana yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Tabel 3.2
Strategi Renstra Kecamatan Kecamatan Anggana Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi di kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, regional, dan kabupaten, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Karanegara secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Anggana sangat penting untuk menunjukkan di mana sub kegiatan akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Dalam pelaksanaan strategi pembangunan di kecamatan, perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Anggana. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan pemanfaatan transformasi pembangunan di Wilayah Kecamatan	Perwujudan fondasi transformasi di Wilayah Kecamatan dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan
Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah serta penguatan kelembagaan pelaku usaha berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing lokal.	Penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi dan pemanfaatan potensi lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Perwujudan transformasi produk unggulan berbasis ekonomi hijau sebagai upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan daerah	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan
Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Pengembangan aksesibilitas wilayah dan fasilitas publik berwawasan lingkungan untuk mendukung pemerataan pembangunan.	Pengembangan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Perwujudan sistem infrastruktur aksesibilitas dan mobilitas yang modern, dan terhubung	Penerapan Integrasi jaringan infrastruktur antarwilayah yang menunjang konektivitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah
Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat	Penerapan Integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana ke dalam seluruh sektor Pembangunan	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Penguatan energi terbarukan dan akselerasi pengurangan emisi karbon untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan

Sumber: hasil analisis, 2025

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Anggana Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Anggana sebagai berikut:

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pelayanan Yang Prima	Digitalisasi layanan publik	Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Perizinan	Penguatan sistem pengaduan	Meningkatkan Koodinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
			Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3	Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Desa dan Kelurahan	Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Menyesuaikan Dengan Pelimpahan Urusan Dari Bupati
5	Peningkatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Desa
7			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
8			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
9			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
10			Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kecamatan Anggana ditentukanlah program, kegiatan, dan sub kegiatan kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Anggana adalah sebagai berikut:

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan merupakan Program untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti

ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam prosesnya.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan teratur di masyarakat, melalui koordinasi berbagai pihak terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan aman, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan program yang bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan tidak termasuk dalam urusan yang menjadi kewenangan daerah atau instansi vertikal. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta koordinasi antar instansi dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Program ini berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan nasional, seperti pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta koordinasi antar instansi untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan

berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Anggana adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di kecamatan
11. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
12. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
13. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
16. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Anggana merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Kecamatan Anggana serta tersebut dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 6



Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan layanan administrasi di Kecamatan	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		
		Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Peningkatan kepuasan masyarakat, efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta peningkatan citra pemerintah	Peningkatan kualitas serta efisiensi dalam pelayanan publik yang disediakan oleh kantor kecamatan Anggana	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP		
					Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik		
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program
				Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
				Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan
				Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan
				Terselesaikan-nya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan
				Terselesaikan-nya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
				Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program
			Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewenangan		Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan		
				Terlaksannya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan
				Terlaksannya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
				Terlaksannnya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program
				<i>Terselenggaranya kegiatan koordinasi pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan</i>	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kegiatan
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
				Terselesaikannya kegiatan pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program
				Terlaksannya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program
				<i>Terlaksana-nya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan</i>	<i>Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kegiatan
					Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan kerukunan	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub Kegiatan
					Jumlah dokumen koordinasi tugas Forkopimc am	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa		Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program
				Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Sub Kegiatan

4.1.1 PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan dibawah ini:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				22.064.229.586,0		41.506.587.465,9		43.121.279.478,70		46.613.985.322,55		49.385.549.685,88		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.380.939.586,0		6.942.616.523,9		6.885.616.523,70		6.842.616.523,55		6.842.616.550,88		
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Anggana)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	44	60	6.380.939.586,0	61	6.942.616.523,9	61	6.885.616.523,70	65	6.842.616.523,55	65	6.842.616.550,88	7.01.1.03.0.00.18.0 00 - Kecamatan Anggana	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				320.000.000,0		350.000.000,0		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	25			25		25		25		25			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	200	200		200		200		200		200			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			3
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000,0		40.000.000,0		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	40.000.000,0	3	40.000.000,0	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,0		5.000.000,0		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	0,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpul dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	200	200	250.000.000,00	200	150.000.000,00	200	150.000.000,00	200	150.000.000,00	200	150.000.000,00		
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	25		0,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.124.732.900,00		5.159.732.900,97		5.159.732.900,70		5.159.732.900,55		5.159.732.900,88		
Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0	5.124.732.900,00	1	5.159.732.900,97	1	5.159.732.900,70	1	5.159.732.900,55	1	5.159.732.900,88		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	462	770		770		770		770		770			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.021.412.900,00		5.021.412.900,97		5.021.412.900,70		5.021.412.900,55		5.021.412.900,88		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	462	770	5.021.412.900,00	770	5.021.412.900,97	770	5.021.412.900,70	770	5.021.412.900,55	770	5.021.412.900,88		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				103.320.000,00		103.320.000,00		103.320.000,00		103.320.000,00		103.320.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	12	12	103.320.000,00	12	103.320.000,00	12	103.320.000,00	12	103.320.000,00	12	103.320.000,00		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				80.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselesiakannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				30.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		0,00		43.000.000,00		0,00		0,00		
Terselesaikan-nya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	0,00	0	0,00	1	43.000.000,00	1	0,00	1	0,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		0		0		0		0			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		43.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	0,00	0	0,00	1	43.000.000,00	1	0,00	1	0,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.304.986,00		318.291.923,00		318.291.923,00		318.291.923,00		318.291.950,00		
Terselesaikan-nya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	230.304.986,00	1	318.291.923,00	1	318.291.923,00	1	318.291.923,00	1	318.291.950,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	500	500		500		500		500		500			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	102	80		102		102		102		102			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.304.986,00		5.304.986,00		5.304.986,00		5.304.986,00		5.304.986,00			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.304.986,00	1	5.304.986,00	1	5.304.986,00	1	5.304.986,00	1	5.304.986,00			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00			
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		152.986.937,00		152.986.937,00		152.986.937,00		152.986.964,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	102	80	75.000.000,00	102	152.986.937,00	102	152.986.937,00	102	152.986.937,00	102	152.986.964,00			
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	500	500	15.000.000,00	500	25.000.000,00	500	25.000.000,00	500	25.000.000,00	500	25.000.000,00			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000,00		330.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00			
Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	50.000.000,00	1	330.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	500.071.700,00	12	548.761.700,00	12	548.761.700,00	12	548.761.700,00	12	548.761.700,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				436.801.700,00		436.801.700,00		436.801.700,00		436.801.700,00		436.801.700,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12	12	436.801.700,00	12	436.801.700,00	12	436.801.700,00	12	436.801.700,00	12	436.801.700,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Listrik yang Disediakan (Laporan)													
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				63.270.000,00		111.960.000,00		111.960.000,00		111.960.000,00		111.960.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	63.270.000,00	1	111.960.000,00	1	111.960.000,00	1	111.960.000,00	1	111.960.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.830.000,00		105.830.000,00		105.830.000,00		105.830.000,00		105.830.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11	75.830.0 00,00	11	105.830.00 0,00	11	105.830.000 ,00	11	105.830.000 ,00	11	105.830.000, 00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.830.000,00		25.830.000,00		25.830.000,00		25.830.000,00		25.830.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11	25.830.000,00	11	25.830.000,00	11	25.830.000,00	11	25.830.000,00	11	25.830.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				14.868.290.000,0 0		12.512.970.942,00		14.184.662.955,00		17.720.368.799,00		20.491.933.135,00		
Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Nilai)	0	3	14.368.290.0 00,00	3	11.962.970.94 2,00	3	13.634.662.95 5,00	3	17.170.368.79 9,00	3	19.941.933.13 5,00	7.01.1.03.0.00.18.0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terhadap pelimpahan kewenangan (Anggana)	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (%)	100	100		100		100		100		100		00 - Kecamatan Anggana	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.368.290.000,0 0		11.962.970.942,00		13.634.662.955,00		17.170.368.799,00		19.941.933.135,00		
Terlaksananya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	240	68	14.368.290.0 00,00	56	11.962.970.94 2,00	64	13.634.662.95 5,00	82	17.170.368.79 9,00	96	19.941.933.13 5,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				768.290.000,00		768.290.000,00		768.290.000,00		768.290.000,00		768.290.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	768.290.000,00	12	768.290.000,00	12	768.290.000,00	12	768.290.000,00	12	768.290.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13.600.000.000,0 0		11.194.680.942,00		12.866.372.955,00		16.402.078.799,00		19.173.643.135,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	240	68	13.600.000.000,0 0	56	11.194.680.942,00	64	12.866.372.955,00	82	16.402.078.799,00	96	19.173.643.135,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Anggana)	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (%)	100	100	500.000.00 0,00	100	550.000.00 0,00	100	550.000.000 ,00	100	550.000.000 ,00	100	550.000.000, 00		
	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Nilai)	0	3		3		3		3		3			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1	400.000.00 0,00	1	400.000.00 0,00	1	400.000.000 ,00	1	400.000.000 ,00	1	400.000.000, 00		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2				2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	150.000.000,00		150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				370.000.000,00		21.416.000.000,00		21.416.000.000,00		21.416.000.000,00		21.416.000.000,00		
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Anggana)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (%)	100	100	370.000.000,00	100	21.416.000.000,00	100	21.416.000.000,00	100	21.416.000.000,00	100	21.416.000.000,00	7.01.1.03.0.00.18.00 - Kecamatan Anggana	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	100.000.00 0,00	5	200.000.00 0,00		200.000.000 ,00	5	200.000.000 ,00	5	200.000.000, 00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	50.000.000,00	5	150.000.000,00		150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				270.000.000,00		21.216.000.000,00		21.216.000.000,00		21.216.000.000,00		21.216.000.000,00		
Terselesaikanya kegiatan pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	270.000.000,00	5	21.216.000.000,00	5	21.216.000.000,00	5	21.216.000.000,00	5	21.216.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				270.000.000,00		21.216.000.000,00		21.216.000.000,00		21.216.000.000,00		21.216.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	270.000.000,00	5	21.216.000.000,00	5	21.216.000.000,00	5	21.216.000.000,00	5	21.216.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000,00		295.000.000,00		295.000.000,00		295.000.000,00		295.000.000,00		
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (anggana) 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	175.000.000,00 175.000.000,00	100	295.000.000,00 295.000.00 0,00	100	295.000.000,00 295.000.000,00	100	295.000.000,00 295.000.000 ,00	100	295.000.000,00 295.000.000, 00	7.01.1.03.0.00.18.0 0 00 - Kecamatan Anggana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
Terlaksannya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	175.000.00 0,00	2	295.000.00 0,00	2	295.000.000 ,00	2	295.000.000 ,00	2	295.000.000, 00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.000.000,00		170.000.00 0,00		170.000.000,00		170.000.000 ,00		170.000.000, 00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	50.000.000,00	2	170.000.00 0,00	2	170.000.000,00	2	170.000.000 ,00	2	170.000.000, 00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				125.000.000,00		125.000.00 0,00		125.000.000,00		125.000.000 ,00		125.000.000, 00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	4	125.000.000,00	4	125.000.00 0,00	4	125.000.000,00	4	125.000.000 ,00	4	125.000.000, 00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000,00		195.000.00 0,00		195.000.000,00		195.000.000 ,00		195.000.000, 00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (anggana)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	195.000.000,00	100	195.000.00 0,00	100	195.000.000,00	100	195.000.000 ,00	100	195.000.000, 00	7.01.1.03.0.00.18.0 0 00 - Kecamatan Anggana	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				195.000.000,00		195.000.00 0,00		195.000.000,00		195.000.000 ,00		195.000.000, 00		
Terlaksana-nya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	500	500	195.000.00 0,00	500	195.000.00 0,00	500	195.000.000 ,00	500	195.000.000 ,00	500	195.000.000, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				180.000.000,00		0,00 180.000.00		180.000.000,00		0,00 180.000.000		00 180.000.000,		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	500	500	180.000.000,00	500	0,00 180.000.00	500	180.000.000,00	500	0,00 180.000.000	500	00 180.000.000,		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		0,00 15.000.00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	0,00 15.000.00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		00 145.000.000,		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Kec.Anggana)	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (%)	100	100	75.000.000,00	100	145.000.000,00	100	145.000.000,00	100	145.000.000,00	100	00 145.000.000,	7.01.1.03.0.00.18.00 - Kecamatan Anggana	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				75.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		00 145.000.000,		
Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	8	8	75.000.000,00	9	145.000.000,00	9	145.000.000,00	9	145.000.000,00	9	00 145.000.000,		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				75.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		00 145.000.000,		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	8	8	75.000.000,00	9	145.000.000,00	9	145.000.000,00	9	145.000.000,00	9	00 145.000.000,		

4.2 Sub Kegiatan Prioritas

Sub kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dari teknik *cascading* (penurunan kinerja). Dan merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program RT Ku-Terbaik	Penyaluran Program RT di kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
2	Program Pelayanan Publik Cerdas	Mini Mall Pelayanan Publik di kecamatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di kecamatan	

4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan, terukur, dan selaras dengan mandat kewenangan serta arah kebijakan pembangunan daerah. IKU menjadi alat ukur strategis yang

digunakan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan mendukung realisasi tujuan jangka menengah dinas. Penetapan IKU memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, serta kontribusi langsung terhadap pelayanan publik di kecamatan. Dengan demikian, keberadaan IKU

dalam dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi dasar pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja secara sistematis dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anggana sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anggana

INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUNAN					KET	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	n/a	3,65	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	n/a	100	100	100	100	100	100	Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi total jumlah Pelayanan dikali 100

INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUNAN					KET	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan yang tertib dan Baik	n/a	70	71	71	72	72	75	Jumlah Desa yang tertib administrasi dan keuangan Penilaian Keuangan: 1. Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskuedes web (20%) Cara hitung: (jumlah desa tepat waktu / jumlah desa di kecamatan). 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdес secara 100% (15%) Cara Hitung:Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi/jumlah desa dikec 3. Persentasi realisasi anggaran (20%) Cara Hitung: jumlah anggaran yang terlaksana 100% / jumlah anggaran desa Penilaian Administrasi: 1. Penyampaian Perdes LPPDes, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret (10%) cara Hitung: jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret/ jumlah desa di kec 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) Cara Hitung: Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa 3. Pengisian Prosdekel dan Sdgs (10%) cara hitung: Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS/jumlah semua desa 4. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%) . Cara hitung: Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan/ jumlah semua desa di kec)

BAB V

PENUTUP

Kecamatan Anggana, dengan luas wilayah mencapai 1.798,80 km² dan populasi sebanyak 40.404 jiwa (data Semester I Tahun 2025), menghadapi tantangan besar dalam pembangunan wilayahnya. Potensi sumber daya alam, posisi strategis di pesisir selatan, menawarkan peluang signifikan untuk pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik. Namun, tantangan berupa tekanan terhadap lingkungan, infrastruktur yang belum memadai, serta masalah sosial-ekonomi membutuhkan pendekatan yang holistik dan berbasis data.

Rencana strategis Kecamatan Anggana untuk periode 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat di wilayah Kecamatan Anggana. Rencana ini menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan lima tahun kedepan, yang dilengkapi dengan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini memuat perencanaan yang bersifat operasional. Rencana ini diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.

Sebagai wilayah yang strategis, Kecamatan Anggana dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan besar. Dokumen ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dengan cara yang terarah, efektif, dan terukur. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta proyeksi masa depan, pelaksanaan kaidah berikut menjadi pedoman untuk Renstra Kecamatan Anggana Tahun 2025-2029:

1. Renstra Perangkat Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Rancangan Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Anggana setiap tahunnya. Penyusunan Renja akan tetap merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Camat melaksanakan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi hasil Renstra Perangkat daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan menggunakan data hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda.
3. Sinkronisasi dengan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Anggana (RKA-Kecamatan Anggana) disusun berdasarkan pedoman Renja Kecamatan Anggana, untuk mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menjamin bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan kecamatan.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Renstra PD
Pelaksanaan Renstra Kecamatan Anggana 2025-2029, yang dijabarkan dalam Renja Perangkat daerah, akan dipertanggungjawabkan secara sistematis dan terstruktur. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dalam bentuk Lapisan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
5. Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan, sesuai dengan tata cara yang diatur oleh pemerintah.

Demikian, dokumen Rencana Strategis Kecamatan Anggana 2025-2029 ini disusun sebagai panduan strategis untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, demi mewujudkan Kecamatan Anggana yang lebih maju dan sejahtera. Kerjasama antara pemerintah kecamatan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.



Anggana, 23 Januari 2026

Camat Anggana

RENDA ABADI, S.STP.,M.Adm.KP

NIP. 198409222003121001